

Analisis Keberlanjutan Rezim Totalitarian Korea Utara Dalam Perspektif Hannah Arendt

Analysis of the Sustainability of North Korea's Totalitarian Regime from Hannah Arendt's Perspective

Gadis Zeffilda^{a,1}

^a Magister Hubungan Internasional Universitas Pelita Harapan, Jl. Jend. Sudirman No.50, Jakarta Selatan, 12930, Indonesia
gadis.zeffilda@gmail.com¹

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji keberlanjutan rezim totalitarian Korea Utara menggunakan perspektif Hannah Arendt. Totalitarianisme, sebagaimana dijelaskan oleh Arendt, mencakup kontrol penuh terhadap pikiran, emosi, dan kehidupan masyarakat melalui teror, propaganda, dan kultus individu. Korea Utara mempertahankan kekuasaannya melalui pengawasan intensif terhadap warganya, penggunaan propaganda, serta pembentukan loyalitas ideologis sejak dini. Sistem ini menciptakan "realitas total" yang menekan kebebasan individu dan mencegah pluralitas. Di bawah kepemimpinan Kim Jong-un, kontrol sosial dan ideologi tetap menjadi alat utama stabilitas rezim. Meski begitu, ketimpangan sosial-ekonomi, isolasi internasional, dan ketergantungan pada sumber daya eksternal melemahkan stabilitas jangka panjang. Rezim ini juga menghadapi tantangan dari sanksi internasional dan perubahan dinamika global. Berdasarkan teori Arendt, sistem totalitarian yang menekankan kontrol dan teror berpotensi mengalami keruntuhan ketika kontrol menjadi tidak efektif. Penelitian ini memberikan wawasan tentang masa depan Korea Utara dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal. Keberlanjutan rezim akan bergantung pada kemampuannya menyesuaikan diri dengan tekanan domestik dan global.

Kata Kunci : Totalitarianisme, Teror, Propaganda, Keberlanjutan Rezim, Korea Utara

ABSTRACT

This study examines the sustainability of North Korea's totalitarian regime through the perspective of Hannah Arendt. Totalitarianism, as described by Arendt, encompasses total control over individuals' thoughts, emotions, and lives through terror, propaganda, and personality cults. North Korea maintains its power through intense surveillance of its citizens, the use of propaganda, and the early establishment of ideological loyalty. This system creates a "total reality" that suppresses individual freedom and prevents pluralism. Under Kim Jong-un's leadership, social control and ideology remain the main tools for the regime's stability. However, socio-economic inequality, international isolation, and reliance on external resources weaken its long-term stability. The regime also faces challenges from international sanctions and shifting global dynamics. Based on Arendt's theory, totalitarian systems that emphasize control and terror are prone to collapse when their control mechanisms become ineffective. This study provides insights into North Korea's future by considering both internal and external factors. The regime's sustainability will depend on its ability to adapt to domestic and global pressures.

Keywords : Totalitarianism, Terror, Propaganda, Regime Sustainability, North Korea

Info Artikel :

Disubmit: 15 Desember 2024

Direview: 10 Januari 2025

Diterima : 11 Februari 2025

Copyright © 2025 - PIR Journal. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Banyak yang berpendapat bahwa setelah kematian Kim Jong-il, rezim totaliter di Korea Utara tidak bertahan lama, tetapi tidak dapat diasumsikan bahwa sistem tersebut akan runtuh (Lee, 1967). Faktanya, rezim totaliter jarang bertahan lebih dari beberapa dekade dan hampir tidak pernah bertahan melewati kematian diktator absolutnya, tetapi Korea Utara merupakan satu-satunya negara dengan rezim ini

yang berhasil bertahan paling lama di dunia, dengan durasi lebih dari 4 dekade (Lee, 1967). Putra dari Kim Jong-il, yaitu Kim Jong-un secara resmi dinyatakan sebagai “Penerus Agung” tertinggi Korea Utara saat ini (Park, 2014). Banyak yang mengira ia akan membawa Korea Utara menuju jalur reformasi dan keterbukaan terhadap dunia, tetapi ideologi tidak bisa lepas dan meninggalkan sistem pemerintahan monolitik. Tampaknya rezim baru Korea Utara akan terus melanjutkan kebijakan dan ideologi lamanya, bahkan semakin memperkuatnya seiring waktu (Park, 2014).

Sering menjadi perhatian dunia di mana penggunaan propaganda sebagai alat utama untuk memperkuat rezimnya. Menciptakan sistem kontrol secara menyeluruh hingga aspek kehidupan warga negara, melalui pendidikan hingga budaya populer, bahkan penggunaan musik menjadi sarana penguatan ideologi negara. Korea Utara baru merilis sebuah lagu berjudul “Friendly Father” pada bulan April 2024, yang menggambarkan pujian bagi sosok bapak yang ramah, baik hati, dan sosok pemimpin hebat. Penggambaran tersebut berkaitan dalam membangun kultus individu yang mencakup pujian berlebihan terhadap pencapaian pemimpin, menyebarkan cerita-cerita moral melalui media pendidikan, melestarikan situs-situs terkait aktivitas pemimpin, bahkan menetapkan hari ulang tahun pemimpin sebagai hari libur nasional yang paling penting adalah suatu karakteristik utama rezim totaliter (Park, 2014).

Rezim totalitarian seperti yang dibahas dalam buku *The Origins of Totalitarianism* (1951) oleh filsuf politik Jerman-Amerika bernama Hannah Arendt, menganalisis secara mendalam bagaimana rezim tersebut berkembang melalui kombinasi ideologi, propaganda, dan teror bertujuan mengendalikan manusia secara menyeluruh (Edkins, 2009). Menurut Arendt, totalitarianisme tidak hanya menguasai aspek material dan ekonomi, tetapi juga seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk pikiran, emosi, dan nilai-nilai. Rezim totalitarian menciptakan “realitas total” tanpa ruang kebebasan, menggunakan ideologi untuk mengendalikan cara berpikir dan perilaku individu (Edkins, 2009). Contohnya, di Korea Utara, propaganda, teror, dan manipulasi kesadaran masyarakat memastikan loyalitas mutlak kepada pemimpin, yang dianggap ilahi dan tak tergantikan.

Karakteristik yang khas dari sebuah negara totaliter di Korea Utara terlihat jelas memiliki dominasi hanya satu partai saja, kontrol terhadap media, pembatasan kebebasan pribadi, bahkan penggunaan kekuatan militer dalam mempertahankan kekuasaannya. Meskipun ketergantungan yang besar pada ideologi mempengaruhi potensi keberlanjutan rezim ini, tidak menutup kemungkinan bahwa keberlanjutan ini akan runtuh apabila Korea Utara menghadapi kesulitan ekonomi, sanksi internasional, and ketegangan politik domestik. Dalam pandangan Arendt, rezim totaliter ini akan menghancurkan kebebasan individu, bahkan Korea Utara sebagai negara karena kekuasaan seperti itu tidak akan bertahan lama (Lee, 2020). Namun, Arendt juga menekankan bahwa sifat destruktif totalitarianisme dapat berlangsung lama, tergantung pada kekuatan ideologi dan alat-alat kontrol rezim (Lee, 2020). Demikian, isu-isu seperti ketidakstabilan ekonomi, keterbatasan sumber daya, serta perubahan dalam dinamika politik global dan regional dapat menjadi faktor yang menentukan apakah rezim ini akan terus bertahan atau akhirnya runtuh.

Untuk memahami potensi keberlanjutan atau keruntuhan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana keberlanjutan Korea Utara dalam rezim totaliter menurut pandangan Arendt, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung baik internal maupun eksternal dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana teori Arendt menjelaskan rezim Korea Utara, serta memberikan wawasan tentang kemungkinan masa depan rezim tersebut, baik dari aspek teoretis maupun empiris.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Hannah Arendt merupakan seorang filsuf politik abad ke-20 asal Jerman-Amerika, yang dikenal karena kontribusinya yang mendalam dalam memahami totalitarisme, khususnya melalui karya monumental *The Origins of Totalitarianism* (1951). Dalam buku tersebut, Arendt mengidentifikasi asal-usul dan mekanisme totalitarisme, dengan fokus utama pada rezim Nazi di Jerman dan Stalinisme di Uni Soviet. Pemikiran Arendt mengenai totalitarisme dengan menggabungkan teori politik, sejarah, dan psikologi sosial untuk menggambarkan sifat totaliter yang luar biasa dari pemerintahan yang menggunakan kekuasaan absolut (Edkins dan Williams, 2009).

A. *Kekuasaan dan Kekerasan (Hannah Arendt)*

Kekuasaan dan kekerasan tidak sama, bagi Arendt kekuasaan dilegitimasi oleh persetujuan dan dukungan dari kelompok yang bertindak bersama. Kekuasaan juga bukan sebagai alat dominasi atau kekerasan, di mana kekuasaan ini hadir Ketika sekelompok orang bertindak bersama untuk mencapai tujuan bersama atau membahas kepentingan bersama (tindakan kolektif). Kekuasaan bukanlah milik individu, melainkan kelompok, serta bersifat sementara dan menghilang apabila kelompok tersebut tidak lagi Bersatu atau bertindak bersama. Tidak perlu menggunakan hal eksternal untuk mempertahankan atau memperoleh kekuasaan, karena kekuasaan sejati tidak membutuhkan kekerasan untuk bertahan (bersifat sebagai kapasitas kolektif) (Arendt, 1958).

Sedangkan, bagi Arendt, kekerasan sebagai alata tau saran untuk memaksakan kehendak (justifikasi). Untuk mempengaruhi atau menguasai orang lain dan memaksakan mereka untuk patuh, kekerasan ini digunakan sebagai alat atau kekuatan fisik. Kekerasan hanya digunakan jika kekuasaan hilang, karena orang yang benar-benar memiliki kekuasaan tidak memerlukan kekerasan untuk mengendalikan atau mengarahkan orang lain. Dalam politik, Arendt berpendapat bahwa menggunakan kekerasan tidak akan mengganggu tatanan politik atau bersifat jangka pendek, sehingga Arendt menolak menggunakan kekerasan dalam menciptakan tatanan global yang baru dan lebih humanis ini memperlihatkan pembentukan latar pemikiran Hannah Arendt, yaitu refleksi atas fakta dan peristiwa yang dialaminya sehingga ini menjadi ciri khas dari pemikiran Hannah Arendt (Arendt, 1958).

Dalam politik bukanlah tentang kekerasan melainkan tentang kemampuan untuk hadir dihadapan orang lain dan berdebat demi membangun dunia bersama. Arendt percaya bahwa *pluralitas* merupakan kondisi esensial dari kehidupan politik, Idealnya dalam sistem politik yang dicita-citakan adalah tindakan, opini, kebebasan dan *plural*, maka Arendt menekankan bahwa hak-hak dan kewajiban politik harus dibatasi oleh keberadaan wilayah dan kesepakatan antar warga negaranya atau menolak pandangan kosmopolitanisme global (Arendt, 1958).

B. *Totalitarianisme Korea Utara*

Rezim totalitarianism merupakan suatu fenomena politik baru abad ke-20 yang muncul dari kombinasi ideologi dan terror, dengan tujuan membuat manusia menjadi tidak berarti dan menghancurkan spontanitas individu, hal tersebut merupakan bentuk kejahatan yang baru dan sangat radikal. Pengaruh Arendt terlihat jelas melalui pengawasan secara menyeluruh dan penggunaan terror, di mana negara ini memiliki sistem pengawasan yang sangat ketat, setiap gerakan individu, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, diawasi dengan ketat oleh agen-agen keamanan negara. Seluruh kehidupan sosial, ekonomi, dan politik dipengaruhi oleh ideologi Kimilsungisme (berakar pada ideologi Kim Il-sung) dan terus dipelihara oleh penerusnya, Kim Jong-il dan Kim Jong-un. Kekuatan rezim Korea Utara juga terletak pada pengaburan kenyataan melalui propaganda dan penggunaan media untuk mengontrol informasi (Edkins dan Williams, 2009).

1) *Propaganda*

Arendt menekankan bahwa peran propaganda dalam rezim totaliter, yang digunakan untuk membentuk persepsi publik dan menciptakan kultus individu, di mana pemimpin dipuja hampir seperti dewa. Dalam hal ini, pemimpin tidak hanya memegang kekuasaan politik, tetapi juga menjadi simbol moral dan ideologis bagi negara. Dalam totalitarisme, propaganda berfungsi

untuk mengaburkan kenyataan dan memanipulasi masyarakat, menciptakan sebuah narasi yang seolah-olah menggambarkan bahwa rezim tersebut adalah satu-satunya sumber kebenaran dan legitimasi (Edkins dan Williams, 2009).

2) Penggunaan Teror

Hannah Arendt, dalam analisisnya tentang totalitarianisme, menyoroti bahwa penggunaan teror tidak hanya dimaksudkan untuk menindas oposisi politik, tetapi juga untuk menciptakan atmosfer ketidakpastian yang mendalam di masyarakat. Ketidakpastian ini berfungsi sebagai alat kontrol yang efektif, yang pada gilirannya menghalangi individu untuk berpikir atau bertindak secara bebas. Teror, menurut Arendt, adalah inti dari sistem totalitarian, yang bukan hanya sekadar alat kekerasan fisik, tetapi juga instrumen psikologis yang bertujuan untuk menghancurkan otonomi individu (Edkins dan Williams, 2009).

Melalui penggunaan teror, totalitarianisme menyerang kehidupan pribadi, memutuskan hubungan sosial yang mendukung solidaritas, dan menggantinya dengan rasa ketakutan serta kecurigaan yang terus-menerus. totalitarianisme bukan hanya beroperasi melalui kontrol fisik, tetapi juga melalui kontrol ideologis dan psikologis, yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sepenuhnya tunduk pada kehendak penguasa (Edkins dan Williams, 2009).

3) Sistem Pengawasan

Kamera pengawas semakin banyak digunakan di Korea Utara sebagai cara untuk meningkatkan keamanan dan mencegah pencurian. Sebagian besar, jika tidak semua, kamera tersebut berasal dari vendor China, dengan fitur mulai dari umpan video dasar hingga unit yang lebih canggih yang dapat menghubungkan sistem pengenalan wajah. Penyebaran CCTV semakin mengancam kemampuan warga negara Korea Utara untuk menghindari pengawasan. Kamera pengawas video tampaknya sudah biasa di semua level sekolah di Pyongyang dan kota-kota besar lainnya di Korea Utara. Kamera-kamera ini mengirimkan gambar ke lokasi pusat dan memungkinkan staf untuk memantau apa yang terjadi di setiap ruang kelas dari jarak jauh. Penempatan kamera dan sistem pengawasan di Korea Utara kemungkinan besar tidak hanya bertujuan untuk memantau perilaku anak-anak, tetapi juga untuk mengawasi pengajaran dan apa yang disampaikan oleh guru kepada murid-murid mereka. Pengawasan video di tempat kerja juga sangat umum dan tampaknya dilakukan untuk beberapa alasan. Banyak pabrik yang menggunakan kamera CCTV untuk memantau mesin dan proses produksi dari jarak jauh, tetapi sistem ini juga diterapkan untuk mencegah pencurian oleh pekerja (Williams, Martyn, dan Slavney, 2024)

4) Isolasi Internasional dan Ketergantungan Eksternal

Salah satu karakteristik paling mencolok dari rezim totaliter Korea Utara adalah isolasi internasional yang sangat ketat. Rezim ini tidak hanya secara aktif menutup diri dari dunia luar, tetapi juga menciptakan mekanisme internal yang dirancang untuk mengendalikan akses masyarakat terhadap informasi dan pengaruh asing. Sistem ini mencakup pembatasan ketat terhadap media, penyensoran informasi dari luar negeri, serta propaganda yang terus-menerus menanamkan narasi bahwa Korea Utara adalah satu-satunya negara yang mandiri, berdaulat, dan bebas dari pengaruh imperialis. Propaganda ini digunakan untuk memperkuat loyalitas rakyat kepada rezim dan membangun persepsi bahwa keterlibatan dengan dunia luar adalah ancaman eksistensial bagi negara (Patterson, 2017)

Namun, di balik upaya isolasi ini, Korea Utara memiliki ketergantungan besar pada bantuan eksternal untuk menopang ekonominya dan menjaga stabilitas internal. Bantuan dari China, yang mencakup suplai energi, pangan, serta dukungan diplomatik, menjadi salah satu elemen vital bagi keberlanjutan rezim. Ketergantungan ini menciptakan kontradiksi dalam narasi yang

dibangun oleh pemerintah, yaitu bahwa Korea Utara adalah negara yang mandiri secara ekonomi dan politik. Faktanya, tanpa dukungan eksternal, terutama dari China, rezim Korea Utara akan menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya (Patterson, 2017).

C. Rezim Korea Utara (Keberlanjutan dan Kerentanan)

Meskipun rezim Korea Utara tampaknya memiliki kontrol yang sangat kuat, terdapat sejumlah kelemahan yang dapat mengancam kelangsungan pemerintahannya. Ketergantungan pada bantuan eksternal, ketimpangan sosial-ekonomi, serta ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan perubahan global maupun domestik dapat mengurangi stabilitasnya dalam jangka panjang. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa meskipun kontrol total terhadap rakyat memungkinkan rezim untuk bertahan sementara, ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosial atau tantangan global dapat memperburuk kondisi internal negara, yang akhirnya mengancam keberlanjutan rezim tersebut. Ini juga dikemukakan oleh sejumlah analis, seperti Stephan Haggard dan Marcus Noland dalam *Hard Target: Sanctions, Inducements, and the Case of North Korea* (2011), yang mengindikasikan bahwa sanksi internasional dan tekanan domestik dapat berperan sebagai faktor kunci yang berpotensi mengubah dinamika internal Korea Utara (Haggard dan Noland, 2017).

3. METODE

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif dengan pendekatan teoretis yang mendalam terhadap karya dan pandangan Hannah Arendt tentang totalitarisme. Analisis ini dilakukan untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip dasar totalitarisme yang dijelaskan oleh Arendt relevan dalam konteks Korea Utara, serta untuk mengevaluasi potensi keberlanjutan atau keruntuhan rezim tersebut.

1) Pendekatan Teoretis

Penelitian ini menggunakan teori totalitarisme Hannah Arendt sebagai kerangka analisis utama. Karya-karya utama seperti *The Origins of Totalitarianism* menjadi dasar untuk memahami karakteristik rezim totaliter, termasuk penggunaan teror, propaganda, dan kultus individu. Perspektif ini akan diaplikasikan untuk:

- Menganalisis struktur dan dinamika kekuasaan rezim Korea Utara
- Mengevaluasi penerapan elemen-elemen totalitarisme dalam kebijakan dan kontrol sosial Korea Utara.

2) Pengumpulan Data

Menggunakan data kualitatif yang dikumpulkan dari berbagai sumber terpercaya memungkinkan analisis yang lebih mendalam dan holistik tentang totalitarisme dan implementasinya dalam konteks Korea Utara. Sumber-sumber ini meliputi jurnal ilmiah yang membahas teori totalitarisme, termasuk karya-karya klasik seperti Hannah Arendt, yang dapat memberikan landasan teoretis, serta studi kontemporer yang memperluas pemahaman tentang dinamika kekuasaan di negara-negara totaliter. Studi kasus Korea Utara, yang mencakup aspek-aspek politik, ekonomi, dan sosial, menjadi elemen penting untuk menggambarkan bagaimana teori ini diterapkan dalam realitas modern. Serta, dokumen resmi, seperti laporan kebijakan pemerintah Korea Utara, resolusi PBB, dan analisis lembaga riset internasional, dapat memberikan data primer tentang kebijakan domestik dan hubungan internasional negara tersebut.

3) Analisis Data

Data yang terkumpulkan akan dianalisis dengan menghubungkan teori Arendt dengan realitas Korea Utara dengan identifikasi elemen totalitarisme dalam rezim Korea Utara (propaganda dan

kontrol teror), evaluasi keberlanjutan rezim, seperti kemungkinan runtuhnya rezim. Analisis data melalui interpretasi teks, deskripsi fenomena, serta mengeksplor skenario untuk mempertimbangkan apakah rezim Korea Utara akan bertahan atau runtuh berdasarkan faktor internal dan eksternal yang relevan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Totalitarianisme di Korea Utara dalam Perspektif Hannah Arendt

Dalam karyanya “The Origins of Totalitarianism”, Hannah Arendt menjelaskan bahwa rezim totaliter berusaha mengendalikan seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk pikiran, emosi, dan nilai-nilai individu (Dolan, 2005). Rezim totaliter mengandalkan teror, propaganda, dan kultus individu untuk menciptakan sebuah “realitas total,” di mana tidak ada ruang bagi kebebasan berpikir atau bertindak (Dolan, 2005). Totalitarianisme berbeda dari diktatorisme atau absolutisme, totalitarianisme merupakan bentuk pemerintahan ekstrem yang berupaya mengontrol total baik tubuh maupun jiwa manusia melalui teror dan propaganda (Arendt, 1979). Tidak seperti diktatorisme, yang fokus pada kekuasaan militer dan monopoli, totalitarianisme menuntut ketaatan penuh dari warganya dan melibatkan pemimpin yang mengklaim berbagi kesadaran kolektif dengan rakyatnya, sehingga tidak memungkinkan adanya koeksistensi dengan sistem lain (Arendt, 1979).

Pemerintahan totaliter sendiri memiliki ciri-ciri, seperti adanya pengawasan intensif terhadap aktivitas negara dan pengumpulan intelijen tentang negara (Williams dan Slavney, 2024). Korea Utara mempertahankan kekuasaannya dengan mengawasi dan mengendalikan warganya melalui berbagai badan keamanan dan biro yang terlibat dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari (Williams dan Slavney, 2024). Di tingkat tertinggi adalah Kementerian Keamanan Negara atau disebut sebagai bowibu (보위부), yang memiliki banyak unit yang bertanggung jawab, salah satunya unit dalam hal pengawasan di mana unit ini sering disebut ‘Group 109’. Agen ini sering melakukan penggeledahan orang di jalan untuk memeriksa ponsel mereka, menyelidiki kasus pembelotan dan spionase, tidak segan untuk menyadap komunikasi warganya, serta terlibat dalam pengendalian internet dan pembertantasan konten asing. Sehingga, banyak warga Korea Utara yang menghindari membahas topik tentang “Dinasti Kim”, kepemimpinan negara, bahkan kebijakan partai buruh korea karena takut dilaporkan. Melalui wawancara dengan warga oleh Martyn Williams dan Natalia Slavney, bahwa banyak warga negara Korea Utara tidak sepenuhnya memahami dampak dari pengawasan digital ini terhadap privasi kehidupan mereka (Williams dan Slavney, 2024).

Dalam pandangan Hannah Arendt, mengatakan kekuasaan muncul ketika sekelompok orang bertindak bersama untuk mencapai tujuan bersama atau membahas kepentingan mereka (tindakan kolektif) (Arendt, 1979). Seluruh sistem Korea Utara berpusat terhadap keyakinan kolektif dan dukungan terhadap negara serta Partai Buruh Korea, yang ditanamkan kepada warga sejak usia dini dan terus diulang sepanjang hidup mereka melalui musik, budaya, pendidikan di sekolah, aktivitas fisik, bahkan media domestik yang hanya menyediakan propaganda. Salah satu contohnya adalah lagu propaganda berjudul “Friendly Father” yang memuja Kim Jong-un, bahkan sering diputar di ruang publik dan acara, sehingga sebagian warga menganggap hal ini berlebihan dan terkadang memicu warga lanjut usia merasa tidak dihormati ketika dipaksa menyebut Kim Jong-un dengan sebutan “ayah” (Radio Free Asia, 2024).

Seperti yang dikatakan oleh Arendt, bahwa kekuasaan dilegitimasi oleh persetujuan dari kelompok yang bertindak bersama dan bukan bersifat kekerasan. Demikian kekuasaan yang dipertahankan oleh Korea Utara bukan hanya menggunakan kekuatan militernya (nuklir), melainkan adanya “Cult Personality” atau kultus kepribadi untuk pemimpin. Kultus kepribadian ini sangat kental, terutama sejak kepemimpinan Kim Il-sung, Kim Jong-il, dan Kim Jong-un, mereka semua dipuja dan dihormati

sebagai sosok yang hampir dewa. Melalui pembentukan propaganda massal, pendidikan ideologi, serta pengaruh yang dilakukan terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari adalah cara untuk mendapatkan dukungan penuh dari rakyat terhadap pemimpin. Pemerintah Kim Jong-un mengontrol pendidikan dan sistem informasi. Di sekolah-sekolah, anak-anak diajarkan untuk memuja keluarga Kim dan negara, materi pelajaran bahkan mengajarkan bahwa pemimpin Kim Jong-un adalah satu-satunya orang yang mampu memimpin Korea Utara menuju kemenangan (Edkins, 2009)

Kepatuhan ini memaksimalisasikan kekuatan polisi, bahkan pencabutan properti secara acak di mana menggunakan teror dengan mengancam untuk menjaga kontrol menyeluruh. Teror ini dapat berupa bentuk hukuman yang sangat keras terhadap setiap bentuk perlawanan atau ketidaktaatan kecil pada sistem pemerintahannya. Salah satu contohnya, kasus seorang mahasiswa di Universitas Virginia yaitu Otto Warmbier, yang ditangkap saat mengunjungi Korea Utara pada Januari 2016 (dEBUSMANN, 2023). Otto dituduh melakukan pencurian poster propaganda dan dijatuhkan vonis selama 15 tahun penjara, ironisnya ia dibebaskan dalam kondisi yang memprihatinkan dengan kepalanya yang dicukur, buta dan tuli, memiliki bekas luka besar dikakinya dan ia meninggal 17 bulan setelah penangkapannya di rumah sakit enam hari setelah kembali ke AS pada juni 2017. Penulis berpendapat bahwa ketidaktaatan kecil yang dilakukan baik oleh warga negaranya sendiri ataupun turis asing, hukuman yang sangat keras dan traumatis tidak segan-segan dilakukan hingga menyebabkan kematian.

Propaganda yang dilakukan tidak hanya tertuju pada warga negaranya sendiri, melainkan negara tetangganya sendiri yaitu Korea Selatan. Selebaran propaganda yang tampaknya dibawa oleh balon yang tersebar di jalan ibu kota Korea Selatan, Seoul pada 24 Oktober 2024 (Kim dan Smith, 2024). Selebaran propaganda tersebut berisi materi propaganda yang memuat pesan grafis dengan menuduh pemerintahan Yoon Suk Yeol gagal, yang membuat rakyatnya hidup dalam keputusan. Hal ini terjadi sebagai bentuk pembalasan Korea Utara terhadap Korea Selatan yang pernah mengirimkan selebaran propaganda juga oleh aktivis Korea Selatan yang memuat tentang kritik kepemimpinan Kim Jong-un. Konsep seperti ini merupakan sistem politik yang sebenarnya berbahaya karena menormalisasikan kekejam melalui kebijakan dan propaganda yang menekan suatu individu tidak berpikir secara kritis (Kim dan Smith, 2024).

B. Kekuatan dan Kerentanan Rezim Totaliter Korea Utara

Menurut Hannah Arendt, totalitarianisme didasarkan pada kesepian massa yang teratomisasi, yaitu kondisi yang bertentangan dengan kehidupan komunal. Namun, rezim totaliter tidak akan membiarkan massa merasa sendiri. Bagi massa, gerakan totaliter yang sering kali kejam tampak sebagai pelarian dari kesepian dalam kehidupan nyata mereka (Arendt, 1958). Arendt juga menyamakan gerakan totaliter dengan ritual keagamaan. Gerakan ini menggabungkan agama dan politik, di mana negara totaliter dikelilingi oleh ideologi pseudo-agama. Dalam hal ini, penguasa bertindak sebagai penyebar ideologi yang menjadi "gereja" itu sendiri atau penggantinya (Glesson, 1984). Pada tahun 1992, Kim Jon-il mengeluarkan buku berjudul *An Essay on Art and Architecture*, yang memuat panduan tentang ruang ideologi bahwa "cara paling efektif untuk propaganda adalah bangunan monumental" (Lee, 2020). Terdapat sekitar 38.000 bangunan monumental yang disebut sebagai "ruang keagamaan," salah satunya diwujudkan dalam bentuk dua patung Kim. Kim Jong-il menjelaskan bahwa tujuan utama pembangunan patung-patung ini adalah untuk menunjukkan siapa yang terbesar di kota dan untuk memuji pencapaian mereka yang dianggap abadi (Lee, 2020).

Arendt berpendapat bahwa dalam rezim totaliter, negara menciptakan sistem keamanan yang mengintegrasikan semua aspek kehidupan pribadi rakyatnya, seperti dalam sistem pengawasan di Korea Utara, bahkan keluarga dan teman dapat diawasi dan melaporkan satu sama lain untuk memastikan kesetiaan terhadap rezim (Williams dan Slavney, 2024). Penggunaan agen keamanan dan polisi yang masif, serta jaringan mata-mata yang tersembunyi di seluruh masyarakat, menciptakan atmosfer ketakutan yang menghambat kebebasan individu dan melanggengkan kekuasaan rezim

(Williams dan Slavney, 2024). Kekuatan rezim ini pun tercermin melalui teror untuk menegakkan kekuasaan dan mencegah oposisi. Di bawah Kim Jong Un, penggunaan teror tampak jelas dalam eksekusi pejabat tinggi dan anggota keluarga yang dianggap mengancam kekuasaannya, seperti pembunuhan pamannya, Jang Song-thaek. Selain itu, pembelotan terhadap rezim dihukum dengan keras, baik melalui eksekusi atau penahanan dalam kamp kerja paksa. Teror ini menciptakan atmosfer ketakutan dan penurunan daya tahan sosial, yang membuat sebagian besar rakyat Korea Utara merasa tidak berdaya untuk melawan atau mengkritik rezim (Williams dan Slavney, 2024).

Penulis berpendapat bahwa kekuatan rezim ini, dapat menciptakan stabilitas politik yang kuat, karena tidak ada oposisi terhadap kekuasaan pemimpinnya. Salah satu aspek dari rezim totaliter di Korea Utara adalah pengembangan kekuatan militer, termasuk senjata nuklir dan rudal balistik. Di satu sisi, meskipun banyak pihak internasional yang mengkritik program senjata ini, bagi Korea Utara, pengembangan kekuatan militer ini memberikan keuntungan dalam hal mempertahankan kedaulatan mereka dan meningkatkan daya tawar negara di kancah internasional. Kekuatan militer yang kuat memberi rezim kemampuan untuk menghadapi ancaman eksternal dan mengurangi kemungkinan intervensi asing.

Meskipun rezim totaliter memiliki kekuatan besar dalam menciptakan kontrol menyeluruh melalui propaganda dan teror, sistem ini memiliki kelemahan inheren yang dapat menyebabkan ketidakstabilan atau bahkan keruntuhan (Baehr P, 2024). Salah satu bentuk kekuatan rezim semacam ini adalah proklamasi "sistem ideologi tunggal" pada tahun 1967 dan ideologi Juche pada tahun 1974. Ideologi tersebut bertujuan membangun ketergantungan rakyat pada negara dan pemimpinnya serta membatasi pengaruh dunia luar (Baehr P, 2024). Sistem monolitik negara ini memiliki kerentanan terhadap keterbukaan negara tersebut. Sistem monolitik ini yang membatasi pengaruh dunia luar bertujuan untuk mencegah rakyat membandingkan kondisi negara mereka dengan negara lain, serta mempertahankan rasa permusuhan terhadap dunia luar untuk memperkuat persatuan domestik. Isolasionisme ini dapat menghambat ekonomi pasar, yang pada dasarnya menekankan transparansi, sebagaimana terlihat bahwa pemimpin Korea Utara menolak dengan tegas terhadap pluralisme politik dan sistem multi-partai. Bertolak belakang dengan pandangan Arendt, bahwa pluralitas merupakan kondisi esensial dari kehidupan politik, di mana politik terjadi saat keberagaman individu dapat bersatu untuk menuju tujuan bersama (Edkins dan Vaughan, 2009). Secara inheren, pluralisme akan menjadi ancaman serius bagi ideologi tunggal Korea Utara, yang membuat negara mereka enggan terbuka terhadap dunia luar.

Faktanya penolakan tegas terhadap pluralisme, berdampak terhadap ketidaksetaraan sosial, politik, dan ekonomi. Ketidaksetaraan sosial yang dibuktikan adanya sistem kasta bahwa akses seseorang terhadap peluang ditentukan berdasarkan latar belakang keluarga atau loyalitas politik, bahkan ketidaksetaraan akses terhadap fasilitas medis. Bahkan dalam sebuah dokumenter yang berjudul "Secret State of North Korea", memperlihatkan rekaman langsung perbedaan mencolok antara kehidupan di Pyongyang dan kehidupan di wilayah lain Korea Utara. Dalam rekamannya terlihat bahwa, daerah di luar Pyongyang, orang-orang terlihat kurus dan kotor, kekurangan gizi, bahkan banyak anak yatim piatu meminta uang atau makanan di pasar (AZPM, 2014).

Penulis berpendapat bahwa fenomena ketimpangan sosial, ekonomi, dan budaya di Korea Utara menunjukkan kerentanannya sebagai rezim totaliter, yang berpotensi menciptakan ketegangan dan ketidakpuasan di kalangan rakyat. Ketidaksetaraan ini dapat memicu pemberontakan besar dari rakyat yang merasa tertindas oleh sistem yang tidak adil, seperti sistem songbun. Jika ketimpangan ini dibiarkan berlarut-larut, kemungkinan besar akan terjadi kelaparan besar, yang pada gilirannya akan memunculkan pasar gelap dan aktivitas ekonomi di luar pengawasan negara. Hal ini dapat secara perlahan melemahkan dan mengganggu stabilitas ekonomi Korea Utara.

Penulis juga mengeksplorasi isu ini melalui sebuah video di laman YouTube "TED Talks," yang menunjukkan peningkatan ketergantungan warga Korea Utara pada sumber eksternal. Banyak warga,

terutama mereka yang merasa tertindas, merencanakan untuk mencari perlindungan di luar negeri, baik dengan melintasi perbatasan atau melalui pembelotan. Salah satu contoh yang disorot adalah seorang perempuan bernama Hyeonseo Lee, yang melarikan diri karena kehidupan yang terbatas, penuh ketakutan, dan ketatnya rezim totaliter. Meskipun Hyeonseo tidak secara eksplisit menyebutkan ketimpangan sosial-ekonomi sebagai alasan utama, ia menggambarkan kesulitan hidup, status sosial (songbun), keterbatasan dalam akses pendidikan, dan peluang sebagai faktor yang mendorongnya mencari dukungan dari negara luar.

C. Potensi Keberlanjutan atau Keruntuhan Rezim Korea Utara

Hannah Arendt tidak hanya menyoroti kekuasaan melalui propaganda, tetapi juga menekankan ancaman kekerasan, seperti senjata nuklir dan dampak limbahnya. Ancaman ini menjadi pengingat bahwa segala sesuatu dapat dihancurkan, sekaligus menunjukkan bahwa modernitas dengan segala kemajuannya membawa risiko besar bagi manusia, terutama jika kesombongan tidak dapat dikendalikan. Arendt melihat ancaman kekerasan, termasuk ancaman nuklir, sebagai ekspresi kekuatan besar yang cenderung melemahkan kekuasaan daripada memperkuatnya. Dalam pandangannya, kekerasan semacam itu bukanlah sumber kekuatan sejati, melainkan justru mencerminkan kelemahan politik (Edkins dan Vaughan, 2009). Fenomena yang terjadi di Korea Utara sejalan dengan pendapat Arendt, di mana totalitarianisme di negara tersebut menunjukkan bagaimana kekuasaan yang berakar pada kekerasan dan propaganda dapat menghancurkan moralitas, kebebasan, dan spontanitas individu dalam menjalani kehidupannya. Lebih jauh, sistem ini bahkan dapat mematikan jiwa manusia, menghilangkan esensi kemanusiaan mereka (Edkins dan Vaughan, 2009).

Bagi Arendt, keberlanjutan suatu rezim totaliter bergantung pada kemampuan negara untuk mempertahankan kontrol mutlak terhadap warganya, baik melalui ideologi yang kuat maupun melalui teror yang sistematis (Edkins dan Vaughan, 2009). Penulis berpendapat, bahwa rezim Korea Utara di bawah kepemimpinan Kim Jong-un, dengan pengawasan yang sangat ketat terhadap setiap aspek kehidupan warganya, tampaknya memiliki potensi untuk bertahan dalam jangka panjang. Sistem pengendalian sosial seperti songbun dan sistem pengawasan yang melibatkan hampir seluruh lapisan masyarakat, memungkinkan rezim untuk mencegah munculnya oposisi yang signifikan. Propaganda negara yang menggambarkan Kim Jong-un sebagai pemimpin yang hampir "ilahi" dan kemampuan untuk mengendalikan diskursus nasional, memperkuat legitimasi rezim di mata rakyatnya, meskipun realitas sosial dan ekonomi sering kali berbeda dengan apa yang dipresentasikan.

Selain itu, Arendt menekankan bahwa totalitarianisme sangat bergantung pada pemusnahan pluralisme dan kebebasan individu untuk menciptakan stabilitas politik. Sistem Korea Utara yang sangat terpusat dan kontrol total yang diterapkan oleh Kim Jong Un terhadap kehidupan politik, ekonomi, dan sosial tidak hanya berfungsi untuk menjaga stabilitas internal, tetapi juga untuk membangun narasi bahwa rezim adalah satu-satunya penjaga keamanan dan kesejahteraan rakyat. Dengan mengeliminasi ruang bagi oposisi politik atau bahkan perbedaan pendapat kecil sekalipun, rezim mampu menciptakan ilusi kesatuan yang mutlak, menjadi landasan bagi legitimasi kekuasaan. Selain itu, kontrol total ini memungkinkan rezim untuk merancang ulang struktur sosial dan ideologis masyarakat agar sesuai dengan tujuan politiknya. Pendidikan, media, dan propaganda digunakan secara ekstensif untuk menanamkan loyalitas tanpa syarat kepada pemimpin tertinggi dan ideologi negara. Maka, totalitranisme tidak hanya menghancurkan *pluralism*, melainkan menghancurkan struktur sosial (Moren, 2014).

Namun, meskipun kekuatan totaliter dapat memberi stabilitas dalam waktu yang lama, Arendt juga memperingatkan bahwa sistem seperti ini cenderung mengarah pada keruntuhan ketika ketergantungan pada teror dan kontrol mulai merusak dasar-dasar sosial dan ekonomi negara (Edkins dan Vaughan, 2009). Rezim Kim Jong Un menghadapi tantangan besar, seperti ketergantungan pada sumber daya eksternal dan dampak dari sanksi internasional yang menghambat perekonomian. Pengembangan

senjata nuklir yang mahal dan program militer lainnya memerlukan biaya besar, sementara negara tidak dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya, yang dapat menyebabkan ketidakpuasan sosial yang meluas. Jika rezim terus mengabaikan kondisi sosial-ekonomi yang buruk, potensi ketegangan dan pemberontakan semakin besar, yang dapat mengancam keberlanjutannya (Moren, 2014).

Dalam jangka panjang, Arendt berpendapat bahwa sistem totaliter yang terlalu menekankan pada kontrol dan teror akhirnya akan menghadapi keruntuhan ketika pengendalian atas rakyat menjadi tidak efektif. Penulis berpendapat, meskipun rezim Kim Jong-un mampu menekan pemberontakan dan mempertahankan kekuasaan melalui kontrol yang sangat ketat, potensi untuk keruntuhan tetap ada, terutama ketika faktor-faktor eksternal seperti krisis ekonomi atau perubahan dalam dinamika global mempengaruhi stabilitas negara. Sejarah menunjukkan bahwa rezim totaliter yang tidak dapat beradaptasi dengan perubahan sosial, ekonomi, dan politik sering kali berakhir dengan kegagalan, dalam kasus Korea Utara, bisa terjadi ketika rakyat atau bahkan elit internal tidak lagi menerima legitimasi yang diberikan oleh rezim. Bahkan ketidaksetaraan ini akan memicu polemik bagaimana Barat dapat memengaruhi masyarakat Korea Utara melalui pasar baru atau pengurangan kendali totalitarian negara. Penulis berpendapat bahwa, ideologi komunis yang mengakar ini perlu dievaluasi kembali mengapa kelas sosial dan mata uang sosial tetap ada dalam masyarakat yang mengklaim kesetaraan.

5. KESIMPULAN

Rezim totalitarian Korea Utara mencerminkan karakteristik utama totalitarianisme sebagaimana dijelaskan oleh Hannah Arendt, termasuk penggunaan teror, propaganda, dan kultus individu untuk menciptakan kontrol menyeluruh atas kehidupan rakyat. Sistem pengawasan yang ketat, propaganda negara yang menggambarkan pemimpin sebagai figur hampir *ilahi*, serta kontrol informasi dan pendidikan, menjadi pilar utama kekuatan rezim ini. Pengembangan kekuatan militer, termasuk senjata nuklir, memperkuat posisi internasionalnya meskipun berada dalam isolasi. Namun, meski stabilitas dapat dipertahankan dalam jangka pendek, ketimpangan sosial-ekonomi, ketergantungan pada sumber daya eksternal, dan ketidakmampuan sistem untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan ekonomi dapat menjadi faktor yang melemahkan legitimasi rezim. Perspektif Hannah Arendt menunjukkan bahwa rezim yang terlalu bergantung pada teror dan kontrol mutlak rentan terhadap keruntuhan ketika dinamika global atau domestik berubah secara signifikan.

Untuk pengembangan lebih lanjut, analisis ini dapat diperluas dengan mengeksplorasi peran masyarakat sipil di Korea Utara, meskipun terbatas oleh pengawasan ketat rezim. Penelitian tentang potensi munculnya gerakan bawah tanah, jaringan informal, atau resistensi pasif di tengah masyarakat dapat membantu memahami bagaimana warga biasa merespons tekanan totalitarian. Selain itu, analisis tentang kemungkinan perubahan internal di dalam struktur kekuasaan menjadi relevan, terutama dengan mempertimbangkan dinamika internal elite politik dan militer, potensi perebutan kekuasaan, atau perubahan kepemimpinan yang dapat mengarah pada reformasi atau, sebaliknya. Selain itu, penelitian lebih mendalam tentang dampak propaganda dan sistem pendidikan terhadap pola pikir generasi muda Korea Utara sangat diperlukan. Sistem ini dirancang untuk mencetak loyalitas yang tak tergoyahkan terhadap rezim, tetapi sejauh mana propaganda ini berhasil dalam era modern.

REFERENSI

- [1] Arendt, Hannah, and Nadia May. "The origins of totalitarianism." (1958).

- [2] Arendt, Hannah. "The origins of Totalitarianism, trans. G. Lee and M. Park." (1979).
- [3] AZPM. "Secret State of North Korea," uploaded by PBS Frontline, January 14, 2014, Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=EhGIEZycKY4>.
- [4] Baehr, Peter. Hannah Arendt, totalitarianism, and the social sciences. Stanford University Press, 2020.
- [5] Debusmann, Bernd Jr. "What Happened to US Citizens like Otto Warmbier Detained in North Korea." BBC News, July 19, 2023. Retrieved from <https://www.bbc.com/news/world-us-canada-66236989>.
- [6] Dolan, Frederick M. "The paradoxical liberty of bio-power: Hannah Arendt and Michel Foucault on modern politics." *Philosophy & Social Criticism* 31, no. 3 (2005): 369-380.
- [7] Edkins, Jenny, and Nick Vaughan-Williams, eds. *Critical theorists and international relations*. Vol. 1. London: Routledge, 2009.
- [8] Gleason, Abbott. "Totalitarianism" , *The Russian Review* 43, no. 2 (1984): 145-159.
- [9] Haggard, S., & Noland, M. (2017). *Hard target: Sanctions, inducements, and the case of North Korea*. Stanford University Press.
- [10] Kim, Jack, and Josh Smith. "North Korea Propaganda Leaflets Found in Seoul Attack South Korea's First Couple." Reuters, October 24, 2024, Retrieved from <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/north-korea-propaganda-leaflets-found-seoul-attack-south-koreas-first-couple-2024-10-24/>
- [11] Lee, Chong-Sik. "Kim Il-Song of North Korea." *Asian Survey* (1967): 374-382.
- [12] Lee, Sihyo. "The making of totalitarian city in Pyongyang: The spatial transition from free to ideology, and for marketization." (2020).
- [13] Moren, R. G. S., and Tri Joko Waluyo. "Reaksi Korea Utara terhadap Kebijakan Korea Selatan Memberhentikan Bantuan Ekonomi terhadap Korea Utara (2008-2011)." PhD diss., Riau University, 2014.
- [14] Park, Yong Soo. "Policies and ideologies of the Kim Jong-un regime in North Korea: Theoretical implications." *Asian Studies Review* 38, no. 1 (2014): 1-14.
- [15] Patterson, Z. (2017). Political, social and economic inequality in North Korea. *North Korean Review*, 13(1), 63-84.
- [16] Radio Free Asia. "North Koreans Are Getting Sick of Propaganda Song 'Friendly Father.'" Radio Free Asia, September 20, 2024, Retrieved from <https://www.rfa.org/english/news/korea/north-korea-propaganda-music-song-cult-of-personality-kim-jong-un-09202024160741.html>
- [17] Williams, Martyn, dan Natalia Slavney. *Digital Surveillance in North Korea: Moving Toward a Panopticon State*. Washington D.C.: 38 North, Stimson Center, April 2024.